

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan kependudukan yang masih menjadi perhatian pemerintah Indonesia adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, karena meningkatnya jumlah penduduk tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas keluarga menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Upaya pembangunan keluarga di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar mampu menjalankan fungsi keluarga secara optimal serta mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Keluarga memiliki delapan fungsi strategis yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Pelaksanaan fungsi keluarga tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Selain itu, pelaksanaan pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk juga diperkuat melalui kebijakan daerah, salah

satunya melalui Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui berbagai program pembinaan keluarga yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya pembangunan keluarga melalui berbagai program pemerintah diarahkan untuk mendukung terciptanya keluarga sejahtera.

Keluarga sejahtera merupakan kondisi keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya baik kebutuhan fisik, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga serta dengan masyarakat dan lingkungannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009). Terwujudnya keluarga sejahtera menjadi salah satu tujuan pembangunan keluarga karena keluarga tersebut akan mampu menciptakan generasi yang berkualitas serta memiliki ketahanan keluarga yang baik. Dengan demikian, pembangunan bangsa hendaknya diawali dari pembangunan keluarga.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan pertumbuhan penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata laju pertumbuhan

penduduk Indonesia per tahun pada kurun waktu 2010-2020 sebesar 1,25 persen atau turun sebesar 0,24 persen apabila dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam kurun waktu 2000-2010 yaitu sebesar 1,49 persen. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari waktu ke waktu mengalami penurunan dari 2,10 persen per tahun pada periode tahun 1961 – 1971 menjadi 1,25 persen per tahun pada periode tahun 2010 – 2020. Meskipun laju pertumbuhan penduduk Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun, peningkatan jumlah penduduk secara absolut tetap memberikan dampak terhadap kondisi kependudukan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bertambahnya jumlah penduduk, khususnya keluarga yang memiliki remaja, menuntut adanya upaya pembinaan keluarga yang lebih terarah agar kualitas generasi muda dapat berkembang secara optimal.

Menyadari pentingnya peran keluarga dalam membentuk generasi yang berkualitas, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan berbagai program pembangunan keluarga sebagai upaya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Salah satu program yang

dikembangkan BKKBN dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga, khususnya keluarga yang memiliki remaja, adalah Program Bina Keluarga Remaja (BKR).

Bina Keluarga Remaja adalah salah satu program unggulan yang digagas oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini dirancang khusus untuk membantu para orang tua dan keluarga dalam menghadapi fase perkembangan anak usia remaja yang penuh tantangan. Tujuannya mulia, yaitu menciptakan keluarga yang mampu mendidik dan membimbing remaja agar tumbuh menjadi individu yang berkualitas, berkarakter, dan terhindar dari berbagai risiko negatif. Program ini menjadi jembatan komunikasi dan edukasi penting antara orang tua, remaja, dan komunitas. Selain itu, program Bina Keluarga Remaja diharapkan menjadi wadah komunikasi, interaksi, dan ajang saling bertukar pemikiran atau pengalaman, serta berupaya untuk menciptakan ketahanan keluarga. Usia remaja yang mengikuti program BKR ini adalah 10-24 tahun. Program Bina Keluarga Remaja memiliki peran penting dalam membantu keluarga menjalankan fungsi pengasuhan dan pendidikan remaja, sehingga diharapkan dapat mendukung terwujudnya keluarga yang sejahtera.

Namun demikian, meskipun Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dirancang sebagai salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas keluarga, khususnya dalam pembinaan remaja, pada kenyataannya program ini belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil observasi awal di Kelurahan Murung Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara,

menunjukkan bahwa pelaksanaan program BKR masih menghadapi berbagai kendala yang berpengaruh terhadap tingkat efektivitas program.

Kondisi tersebut terlihat dari masih rendahnya partisipasi keluarga yang memiliki remaja dalam mengikuti kegiatan BKR karena kurangnya sosialisasi sehingga tidak semua sasaran program mengetahui dan memahami tujuan serta manfaat kegiatan BKR. Selain itu, dari sisi sumber daya manusia, kader BKR belum sepenuhnya memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan pembinaan karena belum mendapatkan pelatihan yang terstruktur. Kondisi ini berdampak pada peran kader dalam kegiatan program belum berjalan secara optimal karena dalam kegiatan kader hanya berperan merangkum hasil pertemuan bulanan, rekapitulasi absensi tanpa membantu memberikan pembinaan kepada peserta.

Di sisi lain, keberlangsungan kegiatan program juga belum berjalan secara konsisten sepanjang tahun karena keterbatasan dana. Keterbatasan anggaran yang tersedia menyebabkan pelaksanaan kegiatan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) hanya dilaksanakan pada periode tertentu saja. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya frekuensi kegiatan, sehingga program tidak mampu memberikan edukasi dan pembinaan secara rutin kepada masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki remaja dan berpotensi mengurangi pencapaian tujuan program dalam membentuk keluarga sejahtera.

Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kelurahan Murung Sari masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, kapasitas

kader, serta keterbatasan anggaran, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat efektivitas program dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Berdasarkan hasil observasi diatas terhadap kondisi di lapangan, ditemukan beberapa fenomena yang menjadi penyebab belum optimalnya efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR), yaitu :

1. Partisipasi keluarga dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi program, sehingga tidak semua keluarga yang memiliki remaja mengetahui dan aktif mengikuti kegiatan BKR. *(Hasil observasi peneliti 2026)*
2. Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) belum mendapatkan pelatihan terkait program BKR. Hal ini menyebabkan kader kurang memahami tujuan kegiatan program BKR dan hanya berperan merangkum hasil pertemuan bulanan, rekapitulasi absensi tanpa membantu memberikan pembinaan kepada peserta. *(Hasil observasi peneliti 2026)*
3. Kegiatan Program BKR belum terlaksana secara berkelanjutan sepanjang tahun akibat keterbatasan anggaran, yang menyebabkan pelaksanaan hanya berlangsung dari pertengahan hingga akhir tahun. Sehingga program tidak mampu memberikan edukasi dan pembinaan secara rutin kepada masyarakat. *(Hasil observasi peneliti 2026)*

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat mengkaji secara mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja, sehingga peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera Di Kelurahan Murung Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam membentuk keluarga sejahtera di Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya terkait rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan program serta kurang optimalnya koordinasi antara kader dan pembina program. Untuk menganalisis efektivitas program tersebut, penelitian ini menggunakan indikator efektivitas menurut Budiani (dalam Amrizal, 2018:59) yang meliputi:

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan program

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam membentuk keluarga sejahtera di Kelurahan Murung Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam membentuk keluarga sejahtera di

Kelurahan Murung Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam membentuk keluarga sejahtera di Kelurahan Murung Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam membentuk keluarga sejahtera di Kelurahan Murung Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan kajian efektivitas pelaksanaan program pemerintah, terutama Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam bidang pembangunan keluarga.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) guna mewujudkan keluarga sejahtera.

- b. Bagi Kader dan Pelaksana Program BKR, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kegiatan program di masyarakat.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam meningkatkan kualitas keluarga yang memiliki remaja.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam membentuk keluarga sejahtera.

